

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Di era globalisasi, organisasi harus tanggap dengan persaingan bebas dan bisa bersaing demi organisasi itu sukses didukung dengan pengaturan terlaksananya pekerjaan organisasi. Ketersediaan informasi di organisasi juga mendukung suksesnya organisasi. Berhasilnya suatu informasi sebagai upaya mendukung kegiatan-kegiatan organisasi ada tiga peran yang harus sesuai meliputi data dan mutu harus serasi, pengorganisasian data, dan bagaimana data digunakan, Priyanto dalam Akadun, (2009, 131)

Akibat diterapkan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi ini memacu daerah untuk berinovasi, kreasi dan distorsi kebijakan, seperti yang diungkapkan Ateng Syafruddin dalam Juanda (2014:126) dimana orang yang diberikan tugas agar mampu mengerjakan pekerjaan dan dipercayai mampu mengelola sendiri tugas tersebut dengan inisiatif disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat.

Keputusan bagaimana mengelola sumber daya manusia yang sebagai modal utama diorganisasi perlu dipertimbangkan. Sebab sumber daya manusia sebagai penggerak, menyusun rencana, mengendalikan rencana, serta menilai organisasi sehingga perlu dioptimalkan. Terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan negara yang sukses merupakan peran penting Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalamnya. Tetapi masih terdapat penyimpangan, tidak disiplinnya aparatur dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang disalahgunakan. Ini yang menjadi permasalahan sumber daya manusia di pemerintahan

Indonesia (Azizy, 2015:52).

Suatu upaya penyelenggaraan pemerintahan dengan penerapan teknologi berbasis elektronik sehingga dapat berkembang, efektif, efisien, dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat lebih bermutu perlu dalam dikembangkannya proses bisnis pemerintahan antara *Government* melalui *e-Government* yaitu. Biaya yang diperlukan sedikit namun mampu memperoleh manfaat transaksi sehingga dikatakan sistem pembayaran yang efisien.

Sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi telah tergantikan dikarenakan kecanggihan teknologi dengan non tunai, toko-toko sudah menerima pembayaran dengan kartu ATM. Jika masyarakat yang belanja dapat membayar dengan kartu ATM, tidak perlu membawa uang tunai karena resiko kehilangan lebih besar. Persaingan antar bank memacu sektor perbankan atau non bank untuk lebih berinovasi menyiapkan media yang lebih aman dan praktis (Santomero dan Seater, 2013).

Salah satu tempat pelaksanaan dari *cashless transaction* ini adalah Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Kartini diambil sebagai tempat pelaksanaan penelitian ini karena pada awal penerapan kebijakan pelaksanaan *cashless Transaction* (transaksi non tunai) awal tahun 2018 Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng adalah salah satu Dinas yang menjadi Pilot Proyek pelaksanaan Transaksi non tunai bersama empat dinas lainnya yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buleleng selama satu bulan, pelaksanaan kemudian setelah itu baru di terapkan di seluruh organisasi perangkat daerah terkait kebijakan *cashless transaction* (transaksi non tunai) dan sistem pengendalian internal pemerintah dan dilakukan oleh orang yang berkompeten.

Sebelum menerapkan cashless transaction sulit untuk mendeteksi peredaran uang palsu di lingkup pembayaran tunai di bendahara (pemerintahan), ada juga indikasi penggelapan oleh oknum-oknum pemerintahan serta administrasi tata kelola keuangan kurang tertib. Setelah diterapkannya cashless transaction ini dapat mencegah peredaran uang palsu di lingkungan pemerintah, sulit untuk melakukan penggelapan akan transaksi oleh oknum-oknum tertentu serta transaksi non tunai dapat mewujudkan aturan yang ketat. Hal ini akan mengakibatkan pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Buleleng akan lebih akuntabel. Dikutip dari NUSABALI.com Pemkab Buleleng kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018, ini sebagai predikat WTP kelima secara beruntun yang diterima Kabupaten Buleleng sebagai prestasi dari Pemkab Buleleng dimana sebelumnya hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Saat ini karyawan dalam perusahaan atau sebuah organisasi sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Karyawan menjadi aset yang berharga bagi organisasi sehingga perlu untuk dihargai bukan hanya digunakan sebagai alat produksi. Sumber daya manusia sebagai penggerak, pengarah, dan berkembangnya (Susilo dan Abdul, 2015).

Kinerja karyawan dapat ditingkatkan melalui sistem pengendalian internal yang ada di organisasi beriringan dengan kinerja karyawan. Apabila sistem baik, semakin baik pula kinerja dari anggota atau karyawan untuk mencapai tujuan dan dapat meningkatkan akuntabilitas suatu organisasi.

Pengendalian internal ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta 3 membantu anggotanya agar melakukan tugas dengan efektif dan efisien, serta membantu

manajer untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam mencapai kinerja yang efektif . Menurut wulansari (2014:119) menyatakan bahwa semakin bagus pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah didukung dari pengawasan sistem.

Pemerintahan adalah pelaku utama dalam melakukan *good government*. Dimana organisasi pemerintah maupun swasta sangat memerlukan sumber daya manusia karena dalam menjalankan kegiatan dari organisasi pemerintah maupun swasta tersebut hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Tidak adanya sumber daya manusia maka kegiatan organisasi tersebut tidak akan berjalan. Karyawan berperan penting sebab ide kreatif, keahlian dan kompetensi sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam pencapaian tujuannya. (Anderson dan Adams dalam Thomas 2009).

Sebelum penerapan *Cashless Transaction* Pemda Buleleng menghadapi kendala/masalah. Menurut Pak Nyoman Suastama selaku Bendahara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Pemda Buleleng sebelum pelaksanaan *Cashless transaction* antara lain: Ada indikasi penggelapan, sulit mendeteksi peredaran uang palsu di lingkup pembayaran tunai di bendahara (pemerintahan), administrasi tata kelola keuangan kurang tertib, kurang akuntabel, dan beberapa kendala lainnya.

Implementasi *Good Government* di Pemerintah Kabupaten Buleleng dari tahun ketahun terus melakukan perbaikan dalam bidang pelayanan, maka untuk dapat mencapai layanan yang lebih baik, bersih dan berwibwa, Pemerintah Kabupaten Buleleng membuat kebijakan yaitu peningkatan pelayanan publik di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang melakukan pelayanan seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo Sandi, dan beberapa

dinas lainnya, berupa aplikasi yang di buat dan bisa di akses dengan mudah oleh masyarakat dalam upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng, contoh di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan, PT USADI dengan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah),

Dengan dikembangkannya Aplikasi SIPKD dalam hal meningkatkan mutu dari cara input Anggaran, dan Penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban, telah dirasakan manfaatnya, demikian juga di dalam penatausahaan asset telah di buat aplikasi SIPEDA, kemudian pada instansi Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, juga telah di kembangkan aplikasi dalam hal meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) ada juga aplikasi PILBKD yang mempunyai fungsi dalam peningkatan pelayanan berbasis IT, dimana kelebihan dari aplikasi ini, masyarakat atau ASN yang mengurus kenaikan pangkat ataupun keperluan lainnya dapat dilihat hasilnya dengan hanya membuka situs ataupun aplikasi ini, maka dokumen yang konsumen urus dapat dilihat kapan selesai ataupun ada kendala kekurangan dokumen tertentu, dapat di cek didalam aplikasi ini, dan banyak lagi aplikasi- aplikasi yang dikembangkan oleh masing masing instansi atau OPD seperti, DAPODIK di Dinas Pendidikan, aplikasi PERIJINAN di Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu, aplikasi di Badan Layanan Pengadaan Sistem Elektronik yaitu, aplikasi SIKAP, SIRUP, SIAP, SIPRAJA, SISMONTPEPRA, lebih lanjut Pemda Buleleng juga membuat layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat kepada Instansi Pemerintah yang berwenang dengan membuka website di <https://www.lapor.go.id>, Pemda Buleleng juga membuat aplikasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang dikelola oleh Bagian Humas dan Dinas Kominfo Kabupaten Buleleng. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng dikembangkan berupa aplikasi BADAS (Bank

Data Arsip Statis) dan OPAS ( *Online Public Acces Catalog*), pada Bagian Hukum juga mengembangkan aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH), di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabuapten Buleleng juga mengembangkan Aplikasi Sistem Share Data Kependudukan (ASI SEDAP) serta aplikasi INSTANSI lewat website di <https://www.bulelengkab.go.id>. dan lain halnya sebelum pelaksanaan *Good Government* dilaksanakan di Pemda Buleleng, kebijakan yang di lakukan masih serba manual, dan pelayanan terkesan agak lambat.

Melihat fenomena yang menarik di Pemda Buleleng seperti yang dimuat pada berita harian jawa post radar Buleleng pada tanggal 13 desember 2019, yang mengangkat tentang gugatan pemilik UD Serba Jaya bapak Ketut Surya Tanaya kepada pemda Buleleng yang belum membayar hutang. Pemda Buleleng melakukan pembelian dengan mekanisme bon oleh kabag perlengkapan dan kasi daerah Buleleng periode 2008-2012, sebesar 94.479.750. kasus diatas merupakan salah satu kasus kurang transparansi dan akuntabelnya Pemda Buleleng dalam melakukan transaksi keuangan. Belajar dari kasus itu maka Pemda Buleleng berkeinginan menerapkan sebuah sistem aplikasi yang dapat meminimalisir kasus seperti diatas. Pemda Buleleng bekerjasama dengan PT Usaidi mengembangkan jaringan aplikasi di Pemda Buleleng yang bernama SIPKD (sistem informasi pengelola keuangan daerah), dengan aplikasi transaksi non tunai (*cashless transaction*) yang bekerjasama dengan BPD Bali cabang Singaraja dengan maksud tujuan untuk menjadikan Pemda Buleleng lebih transparansi dan akuntabel.

Pada tahun 2020 dalam pelaksanaan *cashless transaction*, Pemda Buleleng bekerja sama dengan pertamina/SPBU dalam melakukan pembelian BBM. Menurut Pak Nyoman Suastama pembelian BBM ini awalnya, Pemda Buleleng diberikan untuk malakukan

pembayaran dengan sistem bon oleh pihak SPBU. Pihak yang ingin melakukan pembelian BBM hanya perlu membawa nota dengan besaran nominal yang sudah ditentukan dan berisi cap resmi dari kantor yang bersangkutan lalu nota tersebut akan diberikan kepada pihak SPBU. Maka pihak SPBU akan memberikan BBM sesuai dengan nota yang sudah diberikan. Namun seiring berjalannya waktu ada beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) yang melanggar perjanjian yang sudah diberikan sehingga pihak SPBU tidak lagi memberikan sistem bon. Masalah yang terjadi dimana beberapa OPD ini terus melakukan pembelian namun terlambat membuat SPJ sampai 1 bulan lebih, dimana perjanjian awal setiap OPD seharusnya membuat SPJ setiap 10 hari. Jika OPD yang bersangkutan tidak membuat SPJ maka uang belum dapat di transfer kepada pihak SPBU, hal ini membuat pihak SPBU merasa dirugikan jadi pembelian bon dihentikan. Pihak SPBU menginginkan pembelian dengan uang tunai dalam melakukan pembelian BBM, tentunya ini merupakan kendala dalam pelaksanaan *Cashless Transaction* (transaksi non tunai).

Berdasarkan yang disampaikan diatas, sehingga peneliti ingin mengetahui masalah penerapan kebijakan transaksi non tunai (*Cashless Transaction*) dan juga sistem pengendalian internal pemerintah, sehingga dilakukan penelitian lebih lanjut terkait **Pengaruh Efektifitas *Cashless Transaction* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Pemda Buleleng Terhadap Penerapan *Good Government* “Study Kasus Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dipaparkan, masalah yang dapat diidentifikasi yaitu : Efektifitas *Cashless Transaction* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terhadap penerapan *Good Government*.

## 1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi masalahnya berkaitan dengan Efektifitas *Cashless Transaction* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terhadap penerapan *Good* di Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng).

## 1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah Efektifitas *Cashless Transaction* berpengaruh signifikan dalam mewujudkan *Good Government* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng (Study Kasus Pada Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng) ?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan dalam mewujudkan *Good Government* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng (Study Kasus Pada Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng) ?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh Efektifitas *Cashless Transaction* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap penerapan *Good Government* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng (Study Kasus Pada Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng).



## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki kegunaan dan dapat berkontribusi kepada semua pihak diantaranya:

### 1. Manfaat Teoritis

Menjadi bahan informasi dan memperluas wawasan terkait Efektifitas *Cashless Transaction* dan sistem pengendalian internal pemerintah dalam suatu organisasi.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Menambah pemahaman keilmuan khususnya *Cashless Transaction* dan sistem pengendalian internal pemerintah.

#### b. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng, menjadi solusi pemecahan masalah dengan *Cashless Transaction* dan sistem pengendalian internal pemerintah.

#### c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Menjadi referensi kepustakaan untuk pihak yang membutuhkan.



